



LAYANAN INSTANSI VERTIKAL TUTUP SEMENTARA MPP Kota Yogya Sesuaikan Operasional

YOGYA (KR) - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya yang baru saja menjalani soft launching pada 30 Juni 2021, harus melakukan penyesuaian jam operasional. Hal ini berkaitan penerapan PPKM Darurat yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogya Nurwidihartana, menjelaskan pihaknya mendukung penuh upaya pengendalian laju penularan Covid-19 yang tengah dilakukan pemerintah. "Perlu ada penyesuaian yang harus kami lakukan agar pengendalian kasus Covid-19 dapat berjalan optimal namun layanan publik juga bisa diakses oleh masyarakat," tandasnya, Minggu (4/7).

Penyesuaian operasional tersebut hampir terjadi di semua sektor layanan publik yang membuka gerai di MPP Kota Yogya. Bahkan layanan milik instansi vertikal harus tutup sementara sampai 20 Juli 2021 sesuai kebijakan dari induk organisasinya. Layanan yang tutup sementara tersebut ialah Polresta meliputi layanan SIM, laporan kehilangan dan SKCK, layanan Samsat, BPJS, Balai POM, KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Bea Cukai, Kantor Imigrasi serta layanan haji dan umrah yang dikelola Kantor Kementerian Agama.

Sedangkan layanan publik yang

diberikan instansi di Pemkot Yogya, sebagian besar juga terjadi perubahan jam operasional. Antara lain layanan Jamkesda yang tetap beroperasi pukul 08.00-14.30 WIB tiap Senin hingga Kamis, dan Jumat hanya sampai pukul 13.30 WIB. Kemudian layanan pajak daerah, BPHTB dan PBB dilayani pukul 08.00-12.00 WIB tiap Senin hingga Kamis dan Jumat sampai pukul 11.00 WIB. Sedangkan layanan rekam KTP, perizinan dan pengambilan dokumen dilayani pukul 08.00-10.00 WIB tiap Senin hingga Jumat.

"Kalau untuk layanan perbankan, PDAM, koperasi dan badan usaha lainnya disesuaikan dengan jam operasional masing-masing," imbuh Nurwidihartana.

Ia menjelaskan, perubahan jam layanan tersebut akan selalu dievaluasi sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat. Hal ini karena selama PPKM Darurat diberlakukan, jumlah pegawai yang harus bekerja di kantor ada pembatasan. Meski demikian, akses terhadap layanan publik tetap diberikan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Masyarakat yang hendak mengakses layanan di MPP Kota Yogya diharap memaklumi hal tersebut. Terutama lebih banyak menghabiskan waktu di rumah serta hanya ke luar rumah untuk aktivitas yang mendesak. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005